

**ANALISIS PELAKSANAAN BELANJA DALAM REALISASI ANGGARAN PADA DINAS
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA GORONTALO UTARA**

Oleh :

ILYAS LAMUDA

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo

e-mail : ilyaslamuda@gmail.com

Abstract

This research aims to improve (1) public trust (2) income and (3) shopping area, which is a container to accommodate a variety of activities and programs that at a certain moment the benefits can be felt by the people, especially people in the province of Gorontalo. This research result found (1) that in 2011 the results of the study demonstrate that the use of Effective spending. Effective expenditure in 2011 this happens because in each sector funds budgeted almost entirely unused and there is also a wholly unused funds as capital expenditure equipment and machinery use of funds reached 100%, so did the other asset sector capital expenditure execution reached 100% This proves that the Department of Culture and Tourism of North Gorontalo District has made good use of the budget that has been given. Due to the personnel expenses such as salary increases may be due to government policy, promotion or position due to the rising class. So the government had to strain to a given budget does not decrease to a given budget. (2) In 2012, studies show that the effectiveness of the use of the Budget has been effective. Effectiveness of this budget because funds are used almost entirely Used, particularly capital expenditure. This is because the rise in capital expenditure Equipment and machinery, is caused in 2012 an increase in the relative Increased infrastructure that has been in the programming of Culture and Tourism District of North Gorontalo same government policy. this happens because in 2012 capital expenditure budget which is used almost 100% absorbed. (3) In 2013, including the criteria Effectively, this proves, that the use of fiscal year 2013 occurred almost entirely absorbed budget to finance programs planned by the Department of Culture and Tourism District of North Gorontalo, This indicates that the local government has been implementing budget well in 2013 despite a decline in the number of overall budget allocation. Thus the above explanation has been described, then shopping in the preparation of budget revenues and expenditures in the Department of Culture and Tourism District North District North Gorontalo Gorontalo said Effective and of hypotheses that have been proposed previously missed based on the results of the research that has been conducted by researchers.

Keywords : expenditure, The realization of the budget

PENDAHULUAN

Didalam APBD terdapat tiga komponen yaitu Pendapatan, Belanja, Pembiayaan. Dalam penelitian ini lebih mengarah pada efisiensi belanja karena dalam Pendapatan semua penerimaan rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Dimana pencatatannya hanya pada saat penerimaan dan harus dihabiskan pada periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Pembiayaan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang anggaran bersangkutan, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran sebaliknya pada Belanja semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang pencatatannya hanya pada saat pengeluaran dalam hal ini pengeluaran anggaran belanja terdiri dari beberapa

jenis belanja yang sangat baik untuk ditentukan efisiensinya.

Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata efisiensi penggunaan Belanja yaitu dengan melihat Anggaran yang sudah digunakan sesuai dengan kebutuhan atau terjadi kelebihan serta kekurangan anggaran terhadap anggaran yang telah terealisasi. Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pergeseran komposisi efisiensi penggunaan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja merupakan upaya logis yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik, pergeseran ini ditunjukkan untuk meningkatkan Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan alat/wadah untuk menampung berbagai kegiatan dan program dimana pada saat tertentu manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Propinsi Gorontalo.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan suatu Lembaga Pemerintah yang bernaung dibawah pengawasan dari Pemerintah Daerah yang mempunyai

Balanced : Jurnal Akuntansi dan Keuangan.....

tugas dan fungsi sebagai pengelola Keuangan Daerah terhadap penggunaan anggaran daerah yang menggunakan Anggaran tersebut sesuai dengan tujuannya agar masyarakat dapat merasakan dan memberikan tanggapan atau masukan bagi Pemerintah Daerah mengenai pembangunan agar pembangunan dapat berjalan dengan efisien.

Menurut Bastian (2006 : 146), Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari suatu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, memberikan jasa atau aktifitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama berkelanjutan dari kesatuan tersebut.

Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen penting yang mengundang perhatian Publik. Belanja daerah tersebut juga mencerminkan kebijakan pemerintah daerah dan arah pembangunan daerah. Dalam organisasi menghasilkan pendapatan merupakan suatu hal yang lebih sulit dibandingkan membelanjakan. Karena sifat belanja yang relative mudah dilakukan dan rentan akan terjadinya inefisiensi dan kebocoran, maka perencanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap belanja sangat penting dilakukan. Setelah dibelanjakan dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Analisis terhadap belanja ini pun mutlak harus dilakukan untuk dijadikan dasar evaluasi, koreksi dan perbaikan kedepan.

Dalam hal ini pemerintah daerah akan dinilai efisien anggaran belanjanya jika Rasio Efisiennya kurang dari 100% maka Pemerintah daerah dinilai telah melakukan Penggunaan anggaran dan jika lebih maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

Pada Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gorontalo Utara dalam anggaran belanjanya masih kurang memenuhi target jadi dengan kata lain bahwa efisiensi dalam realisasi dan anggaran belanjanya tidak efisien.

Dengan memperhatikan uraian diatas, maka dapat ditentukan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana Pelaksanaan Belanja Dalam Realisasi Anggaran belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gorontalo Utara. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Belanja dalam Realisasi Anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gorontalo Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Keuangan Daerah

1. Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

Seperti diketahui bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi. Yang

Balanced : Jurnal Akuntansi dan Keuangan.....

Produced By. PUSKEB Fakultas Ekonomi Universitas Gorontalo

dimaksudkan dengan pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan transaksi yang bersifat ekonomik dan yang tidak. Pada dasarnya, transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Jadi seluruh transaksi dalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses berikutnya adalah proses pencatatan transaksi ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi melalui penambahan dan atau sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

2. Siklus Akuntansi Keuangan Daerah

Pada dasarnya dalam Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah siklus akuntansi keuangan daerah yang mengikuti siklus akuntansi secara umum. Perbedaannya adalah pada proses penyusunan laporan keuangan daerah, saat penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian dapat disusun laporan perhitungan APBD. Namun untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan daerah yang lain yaitu laporan perubahan ekuitas dana atau rekening dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah, laporan aliran kas dan neraca biasanya terlebih dahulu dilakukan proses tutup buku dengan membuat jurnal penutup kemudian, setelah jurnal penutup ini diposting, barulah disusun ketiga laporan yang dimaksud.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

Definisi APBD yang dikemukakan oleh wajong (2008 : 81). APBD adalah rencana pekerjaan keuangan (financial workplan) yang dibuat untuk satu jangka waktu ketika badan Legislatif (APBD) memberikan kredit pada badan Eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran dan menunjukkan sebuah penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Penjelasan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 18 Ayat (2) menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang – undang. Bila demikian pasal ini merupakan landasan filosofis dan landasan konstitusional pembentukan undang-undang tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pendapatan

Pendapatan merupakan suatu bagian yang penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP : 2005) Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu di bayar kembali oleh pemerintah.

Menurut bastian (2006 : 146), Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari suatu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, memberikan jasa atau aktifitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama berkelanjutan dari kesatuan tersebut. Pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan lain aset sebuah entitas atau pelunasan utangnya selama satu periode terutama yang berasal dari pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktifitas lainnya yang merupakan kegiatan utama yang masih berlangsung dari entitas tersebut (Riahi Belkaoui, 2005 : 151)

Belanja

Menurut Rinusu dan Sri Mastuti (2005 : 18) mengemukakan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Untuk memudahkan penilaian kewajaran biaya suatu program atau kegiatan, anggaran belanja setiap SKPD terlebih dahulu diklasifikasikan berdasarkan kelompok yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja lain-lain/tak terduga.

1. Belanja Operasi adalah pengeluaran Anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemda yang member manfaat jangka pendek. Kelompok belanja Operasi terdiri atas: Belanja Pegawai, Belanja dan jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan social, Belanja Bantuan Keuangan.
2. Belanja Modal untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan asset tetap lainnya.
3. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah (menutup devisit atau memanfaatkan surplus), yang dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Menurut standar akuntansi pemerintah (SAP) definisi pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perluh dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup devisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Efisiensi Belanja

Menurut Mardiasmo (2005 : 133), bahwa efisiensi diukur dengan ratio output dan input. Semakin besar output dibandingkan input, maka semakin tinggi efisiensi suatu organisasi. Sedangkan Halim (2008 : 28), mengemukakan bahwa efisiensi adalah tercapainya output yang maksimum dengan input tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi Osborne dan Gaebler dalam Munir dkk (2007 : 45), adalah ukuran berapa banyak biaya untuk masing-masing unit output. Ketika kita mengukur efisiensi, kita tahu berapa banyak biaya yang kita tanggung untuk mencapai suatu output tertentu. Efisiensi merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu, (Darise, 2006 : 25). Selanjutnya Devas dkk, sebagaimana dikutip Munir dkk (2009 : 165), mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai tersebut. Hal ini mengartikan bahwa semakin rendah hasil perbandingan antara input dan outputnya berarti tingkat efisiensi semakin tinggi.

Laporan Realisasi Belanja

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemda berdasarkan pemendagri Nomor 13 tahun 2006 merupakan suatu system yang secara komperensif mengatur dan Prosedur-Prosedur akuntansi-akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas, dan prosedur akuntansi aset.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59

Tahun 2007 mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.. Penatausahaan keuangan daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan yang penting dalam proses keuangan daerah secara keseluruhan. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Sebelum berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, pengaturan mengenai Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam setiap prosedur tersebut adalah fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, laporan yang dihasilkan, dan uraian teknis prosedur.

Laporan Realisasi Belanja adalah data laporan belanja yang telah terealisasi atas pengeluaran daerah. Laporan Realisasi Belanja disajikan dengan klasifikasi belanja selama satu periode. Laporan realisasi belanja yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk mhenilai kinerja belanja daerah.

Esiensi Belanja

Menurut Mahmudi (2007: 152) Rasio Efisiensi Belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan

pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini.

$$\text{Rasio Efisiensi belanja} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel. Tingkat Efisiensi.

Presentase Efisiensi Belanja daerah	kriteria
100 % ke atas	Tidak Efisien
90 % - 100%	Kurang Efisien
80 % - 90 %	Cukup Efisien
60 % - 80 %	Efisien
Dibawah dari 60%	Sangat Efisien

Sumber :Mahmudi (2007 :152)

Metode Analisis

Untuk mengelola pengumpulan data yang telah dikumpulkan dari kasil penelitian guna mencapai tujuan, penulis menggunakan metode analisis yaitu:

1. Metode kualitatif yaitu menguraikan atau menjelaskan data-data yang di terapkan dilapangan secara deskriptif.,
2. Metode kuantitatif yaitu analisis dalam bentuk angka-angka yang dipakai dalam perhitungan

dengan menggunakan metode analisis Rasio Efisiensi Belanja.

Adapun untuk menentukan efisiensi belanja yaitu menggunakan metode Analisis Rasio Efisiensi belanja, Maka formulasi dari Analisis Rasio Efisiensi Belanja

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Secara operasional anggaran daerah merupakan alat untuk mengukur kemampuan dan potensi suatu daerah serta berbagai alat alokasi dana/pembiayaan untuk berbagai program dan kemudian diterapkan dalam menjalankan fungsi dan tugas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Dalam kaitan ini penggunaan belanja hendaknya tertuju pada program yang dapat mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya secara Efektif.

Belanja diprioritaskan pada optimalisasi fungsi dan tugas dari perangkat daerah yang telah dan akan

Belanja Daerah (APBD) seperti pajak penghasilan daerah dan dana dari pusat atau yang sering disebut dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Pinjaman luar negeri serta tabungan pemerintah melalui departemen atau lembaga non departemen yang dialokasikan untuk membiayai Operasional SKPD tersebut.

Efektifitas penggunaan Belanja yaitu dengan melihat anggaran yang telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program atau kelebihan serta kekurangan anggaran terhadap anggaran yang telah terealisasi. Dimanana pergeseran komposisi efektifitas penggunaan belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah khususnya Dinas kebudayaan dan

dilimpahkan kepada pemerintah daerah, dimana setiap penggunaan anggaran harus diikuti peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi Belanja merupakan suatu kebijakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan yang sudah disepakati. Oleh karena itu, penganggaran Belanja dilakukan secara proporsional terutama pada sector-sektor yang dapat menunjang tumbuhnya perekonomian daerah.

Untuk mengetahui apakah belanja Dalam Realisasi Anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara Tidak Efektif. Maka peneliti menggunakan rumus Efektivitas dan juga menggunakan table criteria penilaian Efektivitas belanja.

Belanja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang digunakan untuk membiayai kegiatan Operasional yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara bersumber dari kas anggaran negara, Dana Alokasi Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

pariwisata merupakan upaya logis yang dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Untuk mengefektifkan Anggaran Belanja, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gorontalo Utara harus mengupayakan seberapa besar pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gorontalo Utara agar bisa mengefektifkan anggarannya.

Maka untuk mengetahui apakah realisasi anggaran belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara telah Efektif, maka peneliti menggunakan metode Efektifitas. Dan untuk lebih jelasnya berikut dapat digambarkan rumus tentang analisis Rasio Efektifitas.

Rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Rasio Efektifitas belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

(Mahsun 2009)

Analisis efektifitas belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2011 dapat di lihat berikut ini

$$\text{Belanja} = \frac{4.515.263.449}{4.623.570.526} \times 100\%$$

$$= 98 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diuraikan bahwa Untuk tahun 2011 total belanja yang dianggarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara sebesar RP 4.623.570.526 sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar RP 4.515.263.449 dengan tingkat presentase sebesar 98 %. Pada Tahun 2011 realisasi anggaran belanja Efektif karena tingkat presentasenya sebesar 98%, ini artinya di pelaksanaan

anggaran belanja pada tahun 2011 hampir terserap seluruhnya anggaran atau dengan kata lain seluruh program yang rencanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terlaksana dengan baik sebagai mana yang telah di programkan pada saat penyusunan rencana angggran belanja pada tahun tersebut.

$$\begin{aligned} \text{Belanja Operasi} &= \frac{3.865.858.449}{3.969.070526} \times 100\% \\ &= 97 \% \end{aligned}$$

Tabel. 2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2011

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja	4,623,570,526	4,515,263,449	98
Belanja Operasi	3,969,070,526	3,865,858,449	97
Belanja Pegawai	2,939,742,115	2,846,607,609	99
Belanja Barang	1,029,328,411	1,019,250,840	99
Belanja Modal	654,500,000	649,405,000	99
Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	17,500,000	17,500,000	100
Belanja Gedung dan Bangunan	514,500,000	509,430,000	99
Belanja Aset Lainnya	70,000,000	70,000,000	100
<i>Data Olahan 2014</i>			

Dari hasil perhitungan analisa ini dengan menggunakan rasio efektifitas atas belanja operasi Dinas Kebudayaan dan pariwisata kabupaten gorontalo urata dimana anggran yang direncanakan pada tahun 2011 atas belanja operasi ini sebesar Rp. 3.969.070526,-sedangkan yang terlealisasi sebesar Rp. 3.865.858.449,-dengan melihat hasil realisasi anggran belanja operasi ini pada tahun 2011

Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara pelaksanaan anggaranya terhitung Efektif karena hampir 100% belanja untuk Operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terlaksana dengan baik, ini artinya seluruh Progran Operasinal kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terlaksana.

$$\begin{aligned} \text{Belanja Pegawai} &= \frac{2.846.607.609}{939.742.115} \times 100\% \\ &= 99 \% \end{aligned}$$

Dari hasil analisis rasio efektifitas ini terhadap belanja pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Gorontalo Utara menunjukan bahwa seluruh anggaran belanja pegawai yang di anggarkan terserap

seluruhnya, ini artinya bahwa belanja pegawai yang telah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara telah sesuai dengan realisasi anggaran yang ada dan tidak ada

indikasi yang menunjukkan ada pergeseran anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan terbukti dengan nilai realisasi sangat efektif.

$$\text{Belanja Barang} = \frac{1.019.250.840}{1.029.328.411} \times 100\% = 99\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektifitas terhadap belanja barang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, dimana anggaran yang di rencanakan sebesar RP. 1.029.328.411,-, sedangkan yang terealisasi RP 1.019.250.840,-, hal ini apabila dipresentase dapat mencapai 99% ini berarti bahwa pelaksanaan anggaran belanja barang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara dapat terlaksana dengan efektif sebagai mana yang telah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2011 tersebut dan tidak terdapat pergeseran anggaran yang tidak sesuai dengan yang di programkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \frac{649.405.000}{654.500.000} \times 100\% \\ &= 99\% \end{aligned}$$

Pada belanja modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara yang kita ketahui bersama bahwa anggaran belanja modal ini di peruntukan dalam pembelanjaan yang berkaitan dengan pembangunan dan peralatan dan mesin yang akan menunjang keberlangsungan kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya serta pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara

dalam pelaksanaan anggarannya mencapai criteria Efektif berdasarkan standar efektifitas yaitu mencapai 99% pelaksanaan anggarannya pada tahun 2011, ini menunjukkan bahwa kinerja belanja Modal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara sangat baik.

Tabel.3. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2012

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja	5,913,386,689	5,766,057,496	98
Belanja Operasi	3,981,186,689	3,884,471,600	98
Belanja Pegawai	1,932,200,000	1,881,585,896	97
Belanja Barang	1,156,150,000	1,137,131,441	98
Belanja Modal	474,650,000	449,054,455	95
Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	124,250,000	123,073,455	99
Belanja Gedung dan Bangunan	340,000,000	315,981,000	93
Belanja Aset Lainnya	10,000,000	10,000,000	100
<i>Data Olahan 2014</i>			

Analisis efektifitas belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2012 dapat di lihat berikut ini

$$\begin{aligned} \text{Belanja} &= \frac{5.766.057.496}{5.913.386.689} \times 100\% \\ &= 98\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diuraikan bahwa Untuk tahun 2012 total belanja yang dianggarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara sebesar RP 5.913.386.689 sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar RP 5.766.057.496

dengan tingkat presentase sebesar 98 %. Pada Tahun 2012 realisasi anggaran belanja Efektif karena tingkat presentasenya sebesar 98%, ini artinya di pelaksanaan anggaran belanja pada tahun 2012 hampir terserap seluruhnya anggaran atau dengan kata lain seluruh

program yang rencanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terlaksana dengan baik sebagai mana yang telah di programkan

pada saat penyusunan rencana angggran belanja pada tahun tersebut

$$\begin{aligned} \text{Belanja Operasi} &= \frac{3.884.471.600}{3.981.186.689} \times 100 \% \\ &= 98 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan analisa ini dengan menggunakan rasio efektifitas atas belanja operasi Dinas Kebudayaan dan pariwisata kabupaten gorontalo urata dimana anggaran yang direncanakan pada tahun 2012 atas belanja operasi ini sebesar Rp. 3.981.186.689,- sedangkan yang terlealisasi sebesar Rp. 3.884.471.600,- dengan melihat hasil realisasi anggaran belanja operasi ini pada tahun 2012 Dinas kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Gorontalo Utara pelaksanaan anggaranya terhitung Efektif karena hampir 100% belanja untuk Operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terlaksana dengan baik, ini artinya seluruh Progran Operasinal kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terlaksana

$$\begin{aligned} \text{Belanja Pegawai} &= \frac{1.881.585.896}{1.932.200.000} \times 100 \% \\ &= 97 \% \end{aligned}$$

Dari hasil analisis rasio efektifitas ini terhadap belanja pegawai pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara menunjukan bahwa seluruh anggaran belanja pegawai yang di anggarkan terserap seluruhnya, ini artinya bahwa belanja pegawai yang telah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara telah sesuai dengan realisasi anggaran yang ada dan tidak ada indikasi yang menunjukan ada pergeseran anggaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan terbukti dengan nilai realisasi sangat efektif

$$\begin{aligned} \text{Belanja Barang} &= \frac{1.137.131.441}{1.156.150.000} \times 100 \% \\ &= 98 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil analisis rasio efektifitas terhadap belanja barang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, dimana anggaran yang di rencanakan sebesar RP. 1.156.150.000,-,sedangkan yang terealisasi RP 1.137.131.441,-, hal ini apabila diprosentase dapat mencapai 98% ini berarti bahwa pelaksanaan anggaran belanja barang pada Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara dapat terlaksana dengan efektif sebagai mana yang telah direncanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2012 tersebut dan tidak terdapat pergeseran anggaran yang tidak sesuai dengan yang di programkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \frac{449.054.455}{474.650.000} \times 100 \% \\ &= 99 \% \end{aligned}$$

Pada belanja modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara yang kita ketahui bersama bahwa anggaran belanja modal ini di peruntukan dalam pembelanjaan yang berkaitan dengan pembangunan dan peralatan dan mesin yang akan menunjang keberlangsungan kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya serta pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara

dalam pelaksanaan anggarannya mencapai criteria Efektif berdasarkan standar efektifitas yaitu mencapai 99% pelaksanaan anggarannya pada tahun 2012, ini menunjukan bahwa kinerja belanja Modal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara sangat baik

Tabel.4. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja	3,486,475,862	3,373,419,836	97
Belanja Operasi	2,774,335,662	2,664,085,836	96
Belanja Pegawai	1,307,275,862	1,278,303,607	98
Belanja Barang	1,467,060,000	1,405,782,229	96
Belanja Modal	712,140,000	689,334,000	97
Tanah	-	-	-
Belanja Peralatan dan Mesin	394,750,000	379,055,000	96
Belanja Gedung dan Bangunan	260,000,000	253,529,000	98
Belanja Aset Lainnya	-	-	-
<i>Data Olahan 2014</i>			

$$\begin{aligned} \text{Belanja} &= \frac{3.373.419.836}{3.486.475.862} \times 100 \% \\ &= 97 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat diuraikan bahwa Untuk tahun 2013 total belanja yang dianggarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara sebesar RP 3.486.475.862 sedangkan anggaran yang terealisasi sebesar RP 3.373.419.836 dengan tingkat presentase sebesar 97 %. Pada Tahun 2013 realisasi anggaran belanja Efektif karena tingkat presentasinya sebesar 97%, ini artinya di pelaksanaan

anggaran belanja pada tahun 2013 hampir terserap seluruhnya anggaran atau dengan kata lain seluruh program yang rencanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terlaksana dengan baik sebagai mana yang telah di programkan pada saat penyusunan rencana agggran belanja pada tahun tersebut

$$\begin{aligned} \text{Belanja Operasi} &= \frac{2.664.085.836}{2.774.335.662} \times 100 \% \\ &= 96 \% \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan analisa ini dengan menggunakan rasio efektifitas atas belanja operasi Dinas Kebudayaan dan pariwisata kabupaten gorontalo urata dimana anggran yang direncanakan pada tahun 2013 atas belanja operasi ini sebesar Rp. 2.774.335.662,- sedangkan yang terlealisasi sebesar Rp. 2.664.085.836,- dengan melihat hasil realisasi anggran belanja operasi ini pada tahun 2013 Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara pelaksanaan anggarannya terhitung Efektif karena hampir 100% belanja untuk Operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terlaksana dengan baik, ini artinya seluruh Program Operasional kegiatan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara terlaksana

$$\begin{aligned} \text{Belanja Modal} &= \frac{689.334.000}{712.140.000} \times 100 \% \\ &= 97 \% \end{aligned}$$

Pada belanja modal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara yang kita ketahui bersama bahwa anggaran belanja modal ini di peruntukan dalam pembelanjaan yang berkaitan dengan pembangunan dan peralatan dan mesin yang akan menunjang keberlangsungan kegiatan yang berkaitan dengan seni dan budaya serta pariwisata

Pembahasan

Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gorut khususnya pengeluaran dan pembiayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membutuhkan suatu perencanaan yang baik serta dapat mencerminkan aspek efektifitas. Fakta dilapangan ditemukan pengalokasian anggaran belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan skala prioritas. Sejalan dengan konteks ini Penggunaan Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gorontalo Utara yang meningkat dari tahun 2011 ketahun 2012 adalah belanja. Peningkatan belanja ini terjadi karena tidak stabilnya harga-harga minyak dunia serta berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah karena pada dasarnya belanja ditetapkan berdasarkan keputusan-keputusan dan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui bahwa :

1. Pada tahun 2011 hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan belanja Efektif. Efektifnya belanja pada tahun 2011 ini terjadi karena pada tiap sektor dana yang dianggarkan hampir terpakai seluruhnya dan ada juga dana yang terpakai seluruhnya seperti belanja Modal peralatan dan mesin penggunaan dananya mencapai 100%, begitu pula pada sector belanja modal asset lainnya pelaksanaannya mencapai 100% Ini membuktikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan penggunaan anggaran dengan baik yang telah diberikan. Karena pada belanja pegawai seperti kenaikan gaji bisa disebabkan adanya kebijakan pemerintah, kenaikan pangkat atau jabatan karena naiknya golongan . Sehingga pemerintah harus berusaha keras agar anggaran yang diberikan tidak mengalami penurunan terhadap anggaran yang diberikan.

2. Pada tahun 2012 hasil penelitian membuktikan bahwa efektifitas penggunaan Anggaran telah Efektif. Efektifnya anggaran ini karena dana yang digunakan Hampir Terpakai seluruhnya,

Kabupaten Gorontalo Utara dalam pelaksanaan anggarannya mencapai criteria Efektif berdasarkan standar efektifitas yaitu mencapai 99% pelaksanaan anggarannya pada tahun 2013, ini menunjukan bahwa kinerja belanja Modal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara sangat baik

khususnya belanja Modal. Hal ini di Karenakan terjadinya Kenaikan pada Belanja modal Peralatan dan mesin, ini di sebabkan pada tahun 2012 peningkatan infrastruktur relatif Meningkatkan yang telah di programkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara bersamaan adanya kebijakan pemerintah . hal ini terjadi karena pada tahun 2012 anggaran belanja modal yang digunakan Hampir 100% terserap seluruhnya.

3. Pada tahun 2013 termasuk pada kriteria Efektif, ini membuktikan,bahwa pada tahun anggaran 2013 terjadi Penggunaan anggaran hampir seluruhnya terserap untuk membiayai program-program yang di rencanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara, Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah sudah melaksanakan anggaran dengan baik walaupun tahun 2013 ini terjadi penurunan jumlah alokasi belanja secara keseluruhan. Dengan demikian atas penjelasan yang telah diuraikan, maka belanja dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara Kabupaten Gorontalo Utara dikatakan Efektif dan dari hipotesis yang telah diajukan sebelumnya tidak terjawab berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan urain yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu serta memperhatikan aspek analisis Efektifitas dalam belanja dan realisasi dan anggaran belanja tahun anggaran 2011 - 2013, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penggunaan belanja pada periaode 1 januari sampai dengan 31 Des tahun 2011 termasuk

pada kriteria Efektif. ini membuktikan bahwa Pada tahun anggaran 2011 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara telah menggunakan anggaran dengan baik sesuai program yang di rencanakan.

2. Penggunaan belanja pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2012 termasuk pada kriteria Efektif Juga. Ini membuktikan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan penggunaan anggaran dengan baik sesuai apa yang diprogramkan.
3. Penggunaan belanja pada periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun 2013 termasuk pada kriteria Efektif lagi. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun anggaran 2013 terjadi Penggunaan anggaran yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara tidak ada penekanan akan anggaran tetapi justru terjadi pemanfaatan anggaran, dengan baik walaupun anggaran belanja tahun 2013 terjadi penurunan anggaran belanja.

Saran

- 1) Dalam Realisasi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara perlu diupayakan peningkatan anggaran dengan skala prioritas agar kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gorontalo Utara tepat dan bisa mengefektifkan anggarannya.
- 2) Dalam pengalokasian anggaran belanja hendaknya selalu memperhatikan Efektifitas belanja terhadap penggunaan anggaran yang tepat atau sesuai dengan yang dibutuhkan pada tiap-tiap belanja agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

Mardiasmo, 2005 Akuntansi pemerintahan Yogyakarta: STIE,

Mardiasmo, 2006, "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah", Andi, Yogyakarta.

Mardiasmo, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta : Andi Offset

Mursyidi, 2009. "Akuntansi Pemerintahan di Indonesia," PT Refika Aditama, Bandung.

Mahmudi, 2006. "Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah", UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

- 3) Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo Utara hendaknya dalam pengalokasian anggaran di tahun-tahun berikutnya memperhatikan potensi-potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara sehingga hal ini akan mendorong pembangunan sector wisata yang ada di Gorontalo Utara

DAFTAR PUSTAKA

Aswasi. H, 2005, Manajemen Keuangan Daerah, UPP AMP YKPN, Yogyakarta

Anggarini yunita, purtando hendra, 2010. "Anggaran Berbasis kinerja", Yogyakarta

Baridwan, zaki, 2005, intermediate accounting yogyakarta: BPFE,

Haryono, yusuf, 2005, Dasar-dasar Akuntansi Jakarta: Rhineka cipta,

Halim, abdul, 2006, Akuntansi Sektor Publik (edisi I), salemba empat., Yogyakarta

Harahap, sofyan syafri, 2006, akuntansi keuangan, PT. Raja Grafindo Persada, Surabaya

Haryono, Al. Jusup, 2006. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE YKPN) Yogyakarta

Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi keuangan Daerah*, : Salemba Empat Jakarta

Jones, Charles O, 2006, Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy), Terjemahan Nasir budiman, Cetakan Pertama, Rajawali, Jakarta

Kieso, dasar-dasar akuntansi, financi accounting, bandung: ma graw hill bookcompany.

Mamesah, Akuntansi Sektor Publik , Jakarta: PT.kawan pustaka, 2006.

Nordiawan, 2007, akuntansi sector publik, penerbit salemba empat, Jakarta.

Suwardjono, 2008 "Teori Akuntansi", Edisi Ketiga, BPFE-YOGYAKARTA, Yogyakarta

Sawir, akuntansi keuangan daerah 2008, (pengertian akuntansi pemerintahan halaman 35), Jakarta: PT. Trans media,.

Surbakti, ramlan, 2008, akuntansi pemerintahan, penerbit PT. Tarsito, Jakarta.